

Evaluasi Program *Point of Sale* (POS) Sebagai Strategi Peningkatan Kesadaran Akuntabilitas Pajak pada Pelaku Usaha di Pasar Banyuasri

Made Devita Indra Kusuma^{1*}, Ni Luh Gede Erni Sulindawati², Putu Eka Dianita Marviliati Dewi³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Ganesha, Jalan Udayana Nomor 11, Singaraja, Buleleng, Bali

E-mail: devitaindra0403@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3432>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 31 Oct 2025

Revised: 06 Nov 2025

Accepted: 13 Nov 2025

Kata Kunci:

Program *Point of Sale*,
Akuntabilitas Pajak,
Kesadaran Pajak,
Evaluasi Program,
Pelaku Usaha,
Pasar Banyuasri.

Keywords:

Point of Sale Program,
Tax Accountability,
Tax Awareness,
Program Evaluation,
Business Actors,
Banyuasri Market.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program *Point of Sale* (POS) sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak pada pelaku usaha di Pasar Banyuasri. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai aspek konteks, sumber daya, pelaksanaan, dan hasil program. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dari 92 pelaku usaha yang menjadi subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program POS berhasil meningkatkan kesadaran akuntabilitas pajak terutama pada aspek konteks, proses, dan hasil, namun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya pendukung, seperti pelatihan pengguna dan dukungan teknis. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya dan dukungan kebijakan program dapat berjalan lebih optimal. Rekomendasi penelitian ini meliputi pengembangan pelatihan intensif dan peningkatan infrastruktur teknologi untuk mendukung keberlanjutan program POS sebagai alat peningkatan kesadaran pajak di pasar tradisional.

This study aims to evaluate the effectiveness of the Point of Sale (POS) program as a strategy to increase tax accountability awareness among business actors at Banyuasri Market. The evaluation used the CIPP model (Context, Input, Process, Product) to assess the context, resources, implementation, and outcomes of the program. Data were collected through questionnaires and interviews from 92 business actors who were the research subjects. The results indicate that the POS program successfully improved tax accountability awareness, especially in the context, process, and product aspects, although challenges remain in the resource aspect, such as user training and technical support. These findings highlight the importance of improving resource quality and policy support to optimize the program's implementation. Recommendations include developing intensive training and enhancing technological infrastructure to support the sustainability of the POS program as a tool for increasing tax awareness in traditional markets.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Made Devita Indra Kusuma, et al (2025). Evaluasi Program *Point of Sale* (POS) Sebagai Strategi Peningkatan Kesadaran Akuntabilitas Pajak pada Pelaku Usaha di Pasar Banyuasri, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3432>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan stabilitas ekonomi lokal. Data dari Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, menyerap hingga 97% tenaga kerja, dan menyumbang sekitar 56–59% terhadap PDB nasional (Candrani, 2023). UMKM juga menyumbang 50% dari total penanaman modal, yang menunjukkan bahwa sektor ini merupakan fondasi utama dalam struktur perekonomian nasional. Namun demikian, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan dan sistem pencatatan transaksi. Ilma & Muid (2023) menjelaskan bahwa UMKM umumnya

ditandai dengan “skala modal yang terbatas, manajemen yang sederhana serta jangkauan pasar yang relatif kecil”. Di sisi lain, Sumarto (2023) menambahkan bahwa “proses dan prosedur operasional pada UMKM masih banyak dijalankan secara manual”, sehingga pelaku UMKM membutuhkan sistem pencatatan transaksi yang lebih terstandarisasi, efisien, dan akurat.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, sistem Point of Sale (POS) hadir sebagai solusi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan akuntabilitas usaha. Menurut Bere et al. (2023), “Point of Sale (POS) adalah sistem terkomputerisasi yang menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mencatat setiap tahap transaksi penjualan, mengelola stok barang serta menghasilkan laporan keuangan secara real-time”. Sistem POS memungkinkan pelaku UMKM untuk mempercepat proses pembayaran, mengurangi kesalahan manual, dan memperkuat kontrol internal atas arus barang dan uang. Lebih lanjut, Prakoso & Priharsari (2022) menyebutkan bahwa “POS merupakan sistem aplikasi mobile yang dirancang untuk mencatat dan memproses transaksi penjualan secara otomatis... sehingga UMKM dapat mengefisienkan operasional penjualan tanpa perlu membangun infrastruktur IT yang kompleks”. Ini menunjukkan bahwa POS tidak hanya menguntungkan dari sisi teknis, tetapi juga relevan bagi UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Di wilayah Kabupaten Buleleng, khususnya Pasar Tradisional Banyuasri, sistem POS telah mulai diterapkan melalui berbagai inisiatif baik dari pemerintah daerah, swasta maupun kalangan akademik. Disdagperinkopukm Kabupaten Buleleng (2025) melaporkan bahwa “toko-toko modern dan apotek di Singaraja banyak menggunakan POS retail yang lebih kompleks, lengkap dengan scanner barcode dan printer struk”, sementara UMKM tradisional mulai menggunakan POS berbasis Android atau cloud. Program ini bahkan terintegrasi dengan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS dalam rangka mendukung digitalisasi pasar dan peningkatan akuntabilitas retribusi. Namun, di lapangan, implementasi POS masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah resistensi dari sebagian pedagang pasar tradisional yang merasa tidak nyaman dengan sistem digital yang dianggap terlalu transparan. Berdasarkan wawancara lapangan, seorang pedagang menyampaikan, “Saya tidak mau pakai POS karena takut nanti data penjualan saya masuk ke dinas pajak. Kalau ketahuan penghasilan saya besar, saya bisa ditagih pajak lebih tinggi” (Wawancara dengan Informan A, 3 Juli 2025). Pedagang lain bahkan menyebut bahwa mereka sengaja mengatakan sistem rusak agar tetap dapat menggunakan pencatatan manual: “Kami kadang bilang aplikasinya rusak biar tetap bisa pakai catatan manual” (Wawancara dengan Informan B, 3 Juli 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih melihat transparansi data sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari pengelolaan usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh Kumanireng & Utomo (2023) yang menyatakan bahwa “resistensi dari pelaku usaha akibat kekhawatiran data mereka langsung terhubung dengan instansi pajak menjadi kendala yang signifikan” dalam adopsi teknologi digital. Selain itu, Wilhelmus et al. (2022) juga mencatat bahwa sistem POS berbasis cloud yang digunakan saat ini masih “rawan dimanipulasi” karena sebagian besar aplikasi tidak mencatat jejak audit (audit trail) secara menyeluruh, sehingga celah untuk penyalahgunaan masih terbuka. Sementara itu, berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi teknologi POS sangat dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (perceived usefulness), kemudahan penggunaan (ease of use), serta dukungan pelatihan dan kebijakan. Adelianna et al. (2019) melalui model TAM menemukan bahwa “perceived usefulness menjadi faktor dominan dalam mendorong adopsi aplikasi Etanee di Pasar Cipanas”. Namun sebagian besar studi masih fokus pada aspek teknis atau perilaku pengguna dan belum mengintegrasikan pendekatan evaluasi yang komprehensif. Dalam konteks ini, pendekatan evaluasi program menjadi sangat relevan. Evaluasi program, menurut Sunu (2023), merupakan “proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu program mencapai tujuannya, mencakup konteks, input, proses, dan hasil (CIPP)”. Evaluasi sistem POS tidak hanya mengukur keberhasilan akhir (output), tetapi juga menilai kesesuaian program dengan kebutuhan lokal, kecukupan sumber daya, kualitas pelaksanaan, serta dampaknya terhadap efisiensi dan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Dengan demikian, kajian evaluatif terhadap penerapan POS di Pasar Tradisional Banyuasri menjadi penting dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta hambatan adopsi sistem digital oleh pelaku UMKM, khususnya dalam aspek transparansi dan perpajakan. Kebaruan dari evaluasi ini terletak pada fokus terhadap dinamika sosial, ketakutan fiskal, serta resistensi digital yang belum banyak disentuh dalam kajian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang kontekstual dan adaptif, agar program digitalisasi pasar rakyat

dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan diterima oleh seluruh pelaku usaha sebagai bagian dari tata kelola ekonomi yang lebih akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian evaluatif dipilih untuk menilai sejauh mana program Point of Sale (POS) di Pasar Banyuasri berhasil meningkatkan kesadaran akuntabilitas pajak pada pelaku usaha. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Arikunto & Jabar (2018) yang menyatakan bahwa evaluasi bertujuan menilai efektivitas program serta mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan karena mampu menggambarkan persepsi dan sikap pelaku usaha secara objektif melalui data numerik (Sugiyono, 2019). Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan wawancara, yang dirancang berdasarkan empat komponen model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Stufflebeam (2003), untuk menilai kebutuhan program, ketersediaan sumber daya, pelaksanaan, serta hasilnya. Subjek penelitian adalah 92 pelaku usaha di Pasar Banyuasri yang telah menggunakan atau menjadi sasaran penerapan sistem POS. Pemilihan dilakukan secara purposive untuk memastikan keterlibatan langsung mereka dalam program. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif (frekuensi, persentase, dan rata-rata), sedangkan data kualitatif dari wawancara dianalisis secara tematik untuk mendalami kendala dan resistensi pelaku usaha terhadap digitalisasi dan pelaporan pajak (Nazir, 2017). Hasil evaluasi diharapkan memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas program POS serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan akuntabilitas pajak dan keberlanjutan digitalisasi pasar tradisional (Widoyoko, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, hasil evaluasi program Point of Sale (POS) di Pasar Banyuasri menunjukkan pola (+ - + +) berdasarkan model evaluasi CIPP, yang berarti program ini tergolong efektif pada aspek Context, Process, dan Product, namun kurang efektif pada aspek Input. Pada aspek Context, program dinilai relevan dengan kebutuhan pelaku usaha dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan transparansi pencatatan keuangan. Hal ini tercermin dari adanya kesadaran sebagian pedagang terhadap pentingnya digitalisasi sistem usaha, terutama dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan akuntabilitas. Pada aspek Process, pelaksanaan program telah sesuai dengan perencanaan dan sebagian besar fitur POS telah dimanfaatkan secara fungsional oleh pedagang, seperti pencatatan penjualan dan pengelolaan stok. Aspek Product juga menunjukkan hasil positif, di mana penggunaan POS mulai berdampak pada peningkatan efisiensi operasional dan kesadaran sebagian pedagang terhadap pentingnya pencatatan yang akurat sebagai dasar perhitungan kewajiban perpajakan.

Namun demikian, aspek Input dinilai kurang efektif karena masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya literasi digital, minimnya pelatihan teknis, keterbatasan perangkat keras yang memadai, serta ketergantungan pada koneksi internet yang belum merata. Di samping itu, resistensi dari pelaku usaha juga muncul akibat kekhawatiran bahwa data yang tercatat secara digital akan langsung terkoneksi dengan instansi perpajakan, yang berpotensi meningkatkan beban pajak mereka. Oleh karena itu, meskipun program POS telah memberikan dampak yang cukup baik secara umum, perhatian khusus perlu diberikan pada aspek Input untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Langkah strategis yang disarankan mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan rutin, penyediaan alternatif sistem POS yang dapat digunakan secara offline, serta edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya akuntabilitas pajak dan jaminan kerahasiaan data. Dengan perbaikan tersebut, program POS diharapkan mampu berjalan lebih optimal dan benar-benar menjadi strategi efektif dalam mendorong budaya transparansi dan kesadaran akuntabilitas pajak di kalangan pelaku UMKM pasar tradisional.

Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik distribusi skor dari masing-masing variabel, dibawah disajikan jumlah, rata-rata, median, modus, standar deviasi, varians, skor maksimum dan skor minimum. Agar memudahkan mendeskripsikan masing-masing variabel, di bawah ini disajikan rangkuman statistik deskriptif seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Rangkuman statistik Deskriptif Variabel *Context, Input, Process, Product*

N 92	Mean	Median	Mode	Std. Deviation	Variance	Range	Minimum	Maximum	Sum
Context	20.6383	21.0000	21.00	1.90557	3.631	8.00	6.00	24.00	1940.00
Input	47.4574	47.0000	47.00	3.87622	15.025	18.00	6.00	56.00	4461.00
Process	20.4468	21.0000	20.00 ^a	2.17818	4.744	9.00	6.00	24.00	1922.00
Product	13.7340	14.0000	14.00	1.21969	1.488	6.00	6.00	16.00	1291.00

Dalam analisis data mengenai Evaluasi program *point of sale* (pos) sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak pada pelaku usaha di Pasar Banyuasri, selain digunakan analisis data deskriptif kuantitatif univariat/kriteria ideal teoritik juga menggunakan analisis skor-T seperti disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Variabel *Context, Input, Process, Dan Product*

No	Variabel	Frekuensi			Keterangan
		F (+)	F (-)	Hasil	
1	Context	51	43	+	Positif
2	Input	45	49	-	Negatif
3	Process	49	45	+	Positif
4	Product	58	36	+	Positif
Hasil		203	173	+++	Sangat Efektif

Berdasarkan hasil analisis data, efektivitas program Point of Sale (POS) sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak pada pelaku usaha di Pasar Banyuasri dapat ditelaah melalui empat aspek utama model evaluasi CIPP, yaitu Context, Input, Process, dan Product. Hasil evaluasi menunjukkan pola (+ - + +), yang berarti bahwa program POS tergolong efektif pada variabel Context, Process, dan Product, namun kurang efektif pada variabel Input. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara kontekstual, pelaksanaan program POS sudah sesuai dengan kebutuhan pasar tradisional yang mulai bertransformasi ke arah digitalisasi transaksi, serta mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan nasional dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas fiskal. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dikemukakan oleh Stufflebeam dan Coryn (2014) bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kesesuaian konteks dengan kebutuhan dan dukungan lingkungan eksternal. Di Pasar Banyuasri, kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM digital melalui program digitalisasi sistem kasir ini didukung pula oleh regulasi perpajakan yang semakin menuntut keterbukaan dan ketelitian pencatatan transaksi (KemenkopUKM, 2024; Disdagperinkopukm Buleleng, 2025). Dengan demikian, aspek Context memberikan fondasi kuat bagi implementasi program POS sebagai alat strategis dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan kewajiban perpajakan.

Namun, pada aspek Input, evaluasi menunjukkan adanya kelemahan yang cukup signifikan. Variabel Input mencakup kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, serta kebijakan pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan program. Meskipun sebagian besar pelaku usaha di Pasar Banyuasri telah memiliki perangkat teknologi dasar seperti smartphone, literasi digital dan pemahaman pajak yang memadai masih menjadi kendala utama. Banyak pelaku usaha yang belum memahami cara optimal mengoperasikan aplikasi POS atau bahkan merasa takut bahwa data yang terekam dalam sistem POS akan langsung digunakan oleh aparat pajak untuk pengenaan sanksi atau pemeriksaan pajak yang ketat (Wawancara Informan, 2025). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Adelianna et al. (2019) dan Wiraksini et al. (2025) yang menunjukkan bahwa resistensi terhadap perubahan digital dan kurangnya sosialisasi mengenai manfaat akuntabilitas pajak dapat menghambat keberhasilan program digitalisasi. Selain itu, akses internet yang tidak merata dan ketersediaan pelatihan teknis yang terbatas menjadi faktor penghambat utama. Dalam konteks ini, Kumanireng & Utomo (2023) menegaskan bahwa dukungan sumber daya dan pelatihan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dan memahami pentingnya pencatatan transaksi yang akurat untuk tujuan perpajakan. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa program POS belum sepenuhnya

didukung oleh input yang optimal, sehingga diperlukan intervensi lebih lanjut dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperbaiki infrastruktur pendukung.

Pada aspek Process, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program POS di Pasar Banyuasri berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa pelaku usaha sudah mengintegrasikan penggunaan POS dalam kegiatan sehari-hari mereka, baik dalam mencatat transaksi, mengelola stok barang, maupun dalam proses pelaporan keuangan. Program ini juga didukung oleh pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi setempat serta pihak swasta yang menyediakan aplikasi POS lokal, seperti “Kasir Bali”, yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tradisional dan kemampuan pengguna. Sejalan dengan pendapat Narvaez & Bock (2019), integrasi teknologi dalam kegiatan usaha yang didukung oleh pendampingan yang memadai akan meningkatkan konsistensi dan keberhasilan implementasi program. Selain itu, penelitian Kristjánsson (2020) menekankan pentingnya keteladanan dan dukungan berkelanjutan agar proses digitalisasi dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pelaku usaha yang awalnya skeptis mulai merasakan manfaat penggunaan POS, terutama dalam hal efisiensi waktu dan pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur, meskipun masih terdapat kelompok yang belum sepenuhnya menggunakan sistem ini secara konsisten.

Pada aspek Product, hasil evaluasi menunjukkan bahwa program POS memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha dalam pencatatan transaksi serta pelaporan pajak. Data digital yang dihasilkan dari sistem POS memungkinkan pelaku usaha dan pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih akurat dan real-time terkait aktivitas bisnis yang berlangsung. Hal ini sangat penting dalam konteks peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban pajak mereka, karena mereka dapat melihat secara langsung bagaimana pencatatan transaksi dapat mempengaruhi kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Temuan ini mendukung hasil studi Berkowitz & Bier (2020) yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi usaha dapat memperkuat perilaku akuntabilitas dan kepatuhan pajak. Namun demikian, evaluasi juga menemukan bahwa belum semua aplikasi POS yang digunakan memiliki sistem pelacakan yang memadai untuk menghindari manipulasi data, sehingga dibutuhkan mekanisme kontrol tambahan seperti otorisasi berlapis dan audit internal secara berkala (Kumanireng & Bayu Utomo, 2023). Peningkatan kualitas produk ini akan sangat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sekaligus meningkatkan transparansi di kalangan pelaku usaha.

Secara keseluruhan, penelitian ini menguatkan teori evaluasi pendidikan dan program model CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam (2003), yang menegaskan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh keempat komponennya secara menyeluruh. Dalam konteks program POS di Pasar Banyuasri, walaupun aspek Context, Process, dan Product menunjukkan hasil yang positif, kelemahan pada aspek Input menjadi perhatian utama untuk pengembangan ke depan. Kualitas sumber daya manusia, termasuk literasi digital dan pemahaman perpajakan, serta ketersediaan sarana dan pelatihan yang berkelanjutan, menjadi kunci sukses agar program dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Penelitian OECD (2021) menekankan bahwa kesiapan sumber daya dan dukungan teknologi merupakan faktor penentu keberhasilan digitalisasi usaha di sektor UMKM. Oleh karena itu, rekomendasi strategis yang diajukan adalah peningkatan program pelatihan teknis dan edukasi perpajakan secara intensif, pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai, serta pendekatan edukatif yang membangun kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem digitalisasi pajak ini. Dengan langkah-langkah tersebut, program POS di Pasar Banyuasri tidak hanya akan meningkatkan kesadaran akuntabilitas pajak, tetapi juga memperkuat tata kelola usaha yang modern, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mendukung peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan ekonomi lokal secara menyeluruh.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program Point of Sale (POS) sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak pada pelaku usaha di Pasar Banyuasri dapat dievaluasi menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Analisis data mengungkapkan bahwa aspek Context, Process, dan Product memperoleh respons positif dari pelaku usaha, yang mengindikasikan bahwa program POS telah sesuai dengan kebutuhan pasar, pelaksanaan berjalan lancar, dan hasilnya memberikan dampak signifikan terhadap transparansi transaksi dan kesadaran

pajak. Namun, aspek Input masih menghadapi kendala utama, terutama terkait kesiapan dan kualitas sumber daya pendukung seperti literasi digital pelaku usaha, pelatihan penggunaan teknologi POS, serta ketersediaan sarana dan infrastruktur pendukung. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program POS sangat bergantung pada optimalisasi sumber daya yang tersedia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap dimensi kesiapan sumber daya dalam variabel Input, sehingga evaluasi tidak hanya menilai ketersediaan alat dan teknologi, tetapi juga kesiapan dan kompetensi pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi POS secara efektif untuk mendukung akuntabilitas pajak. Penelitian ini juga memperkuat temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa aspek Input sering menjadi faktor penghambat utama dalam keberhasilan program digitalisasi dan peningkatan kesadaran pajak (Adeliana et al., 2019; Kumanireng & Utomo, 2023; Wiraksini et al., 2025). Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model evaluasi yang lebih komprehensif dengan memasukkan indikator kesiapan sumber daya manusia, pelatihan teknis, serta infrastruktur pendukung digitalisasi usaha. Selain itu, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menggali lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan sumber daya serta strategi efektif dalam mengatasi kendala yang ada. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan digitalisasi sistem transaksi dan peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha di pasar tradisional di era ekonomi digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang terlihat dalam penulisan artikel ini, terutama kepada pihak institusi, dosen pembimbing, tempat penelitian dan kedua orang tua serta teman-teman yang telah membantu dalam proses penelitian ataupun pembuatan artikel ini.

REFERENSI

- Abdullah, M., dkk. (2021). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Adeliana, D., Putra, I. N., & Santoso, H. (2019). Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mikro di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pajak*, 15(2), 123-135.
- Agung, A. A. G. (2021). Evaluasi program pelatihan vokasional berbasis potensi lokal masyarakat pesisir. *Jurnal Inovasi Sosial dan Pembangunan*, 6(2), 67-75.
<https://doi.org/10.23887/jisp.v6i2.37834>
- Ahyar, M., dkk. (2020). *Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ambiyar. (2019). *Konsep dan Implementasi Evaluasi dalam Pendidikan*. Bandung: Penerbit ABC.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2017). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- Andriasari, R., dkk. (2024). Pengembangan Aplikasi POS Multi-Cabang untuk UMKM. *Jurnal Expert*, Universitas Bandar Lampung. Diakses dari jurnal.ubl.ac.id.
- Arifah, N., & Susanti, R. (2017). Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja UMKM. *Jurnal Teknologi dan Informatika*, 8(1), 45-53.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2018). *Evaluasi Program Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Artawan, I. M. (2018). Model evaluasi program berbasis kebutuhan peserta terhadap hasil pelatihan keterampilan kerja. *Jurnal Kajian Terapan*, 6(2), 112-121.
<https://doi.org/10.23887/jkt.v6i2.29401>
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2018). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press.
- Chen, H. T. (2015). *Practical Program Evaluation: Theory-Driven Evaluation and the Integrated Evaluation Perspective*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Danardani, W., & Hidayat, S. (2022). Evaluasi program latihan psikologi dalam periodisasi latihan di klub Akademi Bola Voli Buleleng. *Jurnal Ilmu Keolahragaan*, 4(2), 108-115.
<https://doi.org/10.23887/jik.v4i2.44444>

- Elias, T., Supriyadi, A., & Nugroho, A. (2019). Hambatan Implementasi Program Digitalisasi pada Pelaku Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 10(1), 45-58.
- Hidayat, R. (2020). Faktor Penghambat Implementasi Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 12(1), 67-80.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2021). Laporan Tahunan Pendidikan Digital di Indonesia. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kumanireng, F. P., & Utomo, D. (2023). Peran Teknologi Point of Sale dalam Meningkatkan Kesadaran Pajak pada Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntabilitas Pajak*, 5(3), 101-117.
- Lickona, T. (2018). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (25th anniversary edition). New York: Bantam.
- Narvaez, D., & Bock, T. (2019). *The Science of Moral Development: Implications for Education*. New York: Routledge.
- OECD. (2021). *Improving Digital Skills for Tax Compliance: Challenges and Strategies*. Paris: OECD Publishing.
- Santoso, B. (2022). Keteladanan Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(1), 59-72.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation Theory, Models, and Applications* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Wiraksini, L., Prasetyo, Y., & Firmansyah, A. (2025). Evaluasi Implementasi Program Digitalisasi Transaksi Pajak pada Pasar Tradisional di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Kebijakan Fiskal*, 7(1), 23-41.